



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan (Kotak Pos 46)  
Telepon : (021) 5253004  
Laman : [www.kemenkumHak.Asasi.Manusia.go.id](http://www.kemenkumHak.Asasi.Manusia.go.id)

## PENGUMUMAN

**NOMOR : SEK.KP.02.04-185**

**TENTANG  
SELEKSI CALON TARUNA/TARUNI  
POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM) DAN POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP)  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/625/M.SM.01.00/2023 tanggal 23 Maret 2023 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Kebutuhan CPNS dari Siswa/Siswi Sekolah Kedinasan Poltekim dan Poltekip Tahun Anggaran 2023, **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** mengundang Putra dan Putri terbaik lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / sederajat dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Poltekim dan Poltekip, dengan waktu pendaftaran secara online mulai dari 1 s.d 30 April 2023, ketentuan pendaftaran sebagai berikut:

### I. PENJELASAN

1. **Formasi Umum** merupakan pelamar lulusan SLTA / Sederajat yang memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.
2. **Formasi Putra / Putri Papua / Papua Barat** merupakan pelamar lulusan SLTA / Sederajat keturunan Papua / Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli Papua / Papua Barat, dibuktikan dengan KTP Bapak / Ibu kandung, Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang bersangkutan dan dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah / Kepala Suku / Ketua / Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP).
3. **Formasi Pegawai** merupakan pelamar yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.
4. **Formasi Pegawai Putra / Putri Papua / Papua Barat** merupakan pelamar keturunan asli Putra / Putri Papua / Papua Barat yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.

### II. PERSYARATAN

1. **Warga Negara Republik Indonesia (Laki-laki / Perempuan);**
2. **Pendidikan SLTA / Sederajat;**
3. Usia minimal **17 tahun** dan usia maksimal **23 tahun 0 bulan 0 hari** pada awal pendaftaran tanggal **1 April 2023** (dibuktikan dengan Akta Kelahiran/surat keterangan lahir);
4. **Tinggi Badan bagi Laki-laki minimal 170 cm, bagi Perempuan minimal 160 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat tes kesehatan oleh Tim Medis yang telah ditunjuk Panitia;**

5. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas Narkoba, tidak memakai kacamata dan/atau *softlens*, tidak tuli, tidak bisu, tidak buta warna, dan tidak pernah mengalami patah tulang;
6. Bagi Laki-laki tidak bertato/bekas tato dan tidak memiliki tindik / bekas tindik di telinga atau anggota badan lainnya;
7. Bagi Perempuan tidak bertato/bekas tato dan tidak memiliki tindik / bekas tindik pada anggota badan lainnya selain telinga dan tidak bertindik/bekas tindik di telinga lebih dari 1 pasang (telinga kiri dan kanan);
8. Belum pernah menikah (baik secara negara, adat maupun agama) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa setempat dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan;
9. Bagi perempuan belum pernah melahirkan dan bagi laki-laki belum pernah memiliki anak biologis;
10. Bersedia ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasarakatan di seluruh Wilayah Indonesia;
11. Tidak sedang menjalani ikatan dinas / pekerjaan dengan instansi / perusahaan lain;
12. Khusus Bagi Calon Taruna/Taruni **formasi pegawai / formasi pegawai Putra / Putri Papua / Papua Barat**, selain harus memenuhi persyaratan di atas (angka 1 s.d. 11), juga harus memenuhi persyaratan :
  - 1) Mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat/golongan ruang setinggi-tingginya Pengatur Muda Tk.I/ (II/b) dibuktikan dengan surat pengantar dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon II atau Kepala Kantor Wilayah);
  - 2) Tidak dalam proses pemeriksaan / tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani secara digital oleh Sekretaris Unit Utama / Kepala Biro / Kepala Kantor Wilayah melalui SUMAKER;
  - 3) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) tahun 2021 dan tahun 2022 minimal bernilai baik dan seluruh komponen / unsur penilaian PPKP minimal baik. Khusus PPKP tahun 2021 dibuat menjadi 2 (dua) periode, yaitu Periode I melalui aplikasi SIMPEG dan Periode II dibuat secara manual sesuai dengan ketentuan Permenpan-RB Nomor 8 Tahun 2021 dan untuk PPKP tahun 2022 dibuat 1 (satu) periode secara manual sesuai dengan ketentuan Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2022 (Format PPKP Tahun 2021 Periode II dan Tahun 2022 dapat diunduh pada pada laman <https://catar.kemenkumham.go.id>).
  - 4) Bagi pegawai yang sedang menduduki Jabatan Fungsional, bersedia mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional setelah diterima sebagai Calon Taruna / Taruni;

### III. FORMASI

Formasi untuk Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah ditetapkan sebanyak 525 Taruna/Taruni untuk Umum dan Putra/Putri Papua/Papua Barat (Sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/625/M.SM.01.00/2023 tanggal 24 Maret 2023) dan sebanyak 85 Taruna/Taruni untuk Pegawai dan Pegawai Putra/Putri Papua / Papua Barat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Formasi Sekolah Kedinasan Poltekim sejumlah 300 Taruna/Taruni terdiri dari:
  - 1) **UMUM**
    - Laki-laki = 219 Taruna
    - Perempuan = 71 Taruni
  - 2) **KHUSUS PUTRA / PUTRI PAPUA**
    - Laki-laki = 3 Taruna
    - Perempuan = 2 Taruni
  - 3) **KHUSUS PUTRA / PUTRI PAPUA BARAT**
    - Laki-laki = 3 Taruna
    - Perempuan = 2 Taruni
2. Formasi Sekolah Kedinasan Poltekip sejumlah 225 Taruna/Taruni terdiri dari:
  - 1) **UMUM**
    - Laki-laki = 176 Taruna
    - Perempuan = 43 Taruni
  - 2) **KHUSUS PUTRA / PUTRI PAPUA**
    - Laki-laki = 2 Taruna
    - Perempuan = 1 Taruni
  - 3) **KHUSUS PUTRA / PUTRI PAPUA BARAT**
    - Laki-laki = 2 Taruna
    - Perempuan = 1 Taruni
3. Formasi Pegawai Sekolah Kedinasan Poltekim sejumlah 10 Taruna/Taruni terdiri dari:
  - 1) **UMUM**
    - Laki-laki = 8 Taruna
    - Perempuan = 2 Taruni
4. Formasi Pegawai Sekolah Kedinasan Poltekip sejumlah 75 Taruna/Taruni terdiri dari:
  - 1) **UMUM**
    - Laki-laki = 66 Taruna
    - Perempuan = 3 Taruni
  - 2) **KHUSUS PUTRA / PUTRI PAPUA**
    - Laki-laki = 2 Taruna
    - Perempuan = 1 Taruni
  - 3) **KHUSUS PUTRA / PUTRI PAPUA BARAT**
    - Laki-laki = 2 Taruna
    - Perempuan = 1 Taruni

#### IV. TATA CARA & MEKANISME PENDAFTARAN

1. Pelamar wajib melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman <https://dikdin.bkn.go.id> dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dimulai tanggal **1 s.d 30 April 2023**;
2. Khusus bagi pelamar **formasi Pegawai dan formasi Pegawai Putra / Putri Papua / Papua Barat** melakukan pendaftaran, unggah berkas lamaran dan cetak tanda bukti pendaftaran secara *online* dimulai tanggal **1 s.d 30 April 2023** pada laman <https://catar.kemenkumham.go.id>;
3. Pelamar hanya boleh memilih 1 (satu) pilihan Sekolah Kedinasan, apabila memilih lebih dari 1 (satu) pilihan Sekolah Kedinasan maka pelamar tersebut secara otomatis dinyatakan gugur / tidak dapat mengikuti tahapan seleksi administrasi;
4. Tidak boleh berkomunikasi dengan Panitia selama berjalannya proses seleksi;

5. Unggah dokumen terdiri dari :

**a. Pelamar Formasi Umum dan Formasi Umum Putra / Putri Papua / Papua Barat**

- 1) Surat lamaran bermaterai Rp. 10.000,-. ditujukan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://catar.kemenkumham.go.id> (dokumen yang diunggah asli);
- 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik (asli) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
- 3) Ijazah (asli), bagi lulusan luar negeri / memiliki ijazah berbahasa asing wajib melampirkan surat penyetaraan / persamaan ijazah dari pejabat yang berwenang (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);  
Bagi pelamar/peserta lulusan SLTA Tahun 2023, sebagai pengganti ijazah wajib melampirkan Surat Keterangan Lulus (asli) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah (menggunakan Kop Surat Sekolah);
- 4) Akta kelahiran / Surat Keterangan Lahir (asli) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bukan dari Bidan atau Puskesmas);
- 5) Surat Keterangan belum pernah menikah (asli) yang ditandatangani oleh Lurah / Kepala Desa sesuai domisili (bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, Ketua RT, Ketua RW atau orang tua);
- 6) Surat Pernyataan 6 poin ditandatangani dengan pena berwarna hitam, bermaterai Rp. 10.000,-. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://catar.kemenkumham.go.id> (dokumen yang diunggah asli);
- 7) Surat Pernyataan Persetujuan dari Orang Tua peserta (asli). Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://catar.kemenkumham.go.id>;
- 8) Pas photo berwarna latar belakang **biru** untuk Poltekim dan latar belakang **merah** untuk Poltekip;
- 9) **Khusus bagi pelamar Formasi Umum Putra / Putri Papua / Papua Barat wajib melampirkan surat keterangan asli dari Kelurahan / Kepala Desa / Kepala Suku / Ketua / Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua / Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (Bapak dan/atau Ibu) asli dari Papua / Papua Barat;**
- 10) Seluruh dokumen persyaratan yang diunggah adalah **scan berkas asli berwarna (tidak hitam putih)** dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka / file tidak rusak dan terbaca dengan jelas;

**b. Pelamar Formasi Pegawai dan Formasi Pegawai Putra / Putri Papua / Papua Barat**

- 1) Surat lamaran bermaterai Rp. 10.000,-. ditujukan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://catar.kemenkumham.go.id> (dokumen yang diunggah asli);
- 2) Kartu Tanda Penduduk yang telah elektronik (e-KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik (asli) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
- 3) Ijazah (asli), bagi lulusan luar negeri / memiliki ijazah berbahasa asing wajib melampirkan surat penyetaraan/ persamaan ijazah dari pejabat yang berwenang;

- 4) Surat Keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh Lurah / Kepala Desa sesuai domisili (asli) (bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, Ketua RT, Ketua RW atau orang tua);
- 5) Surat Pernyataan 6 poin ditandatangani dengan pena berwarna hitam, bermaterai Rp. 10.000,-. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://catar.kemenkumham.go.id> (dokumen yang diunggah asli);
- 6) Pas photo berwarna latar belakang **biru** untuk Poltekim dan latar belakang **merah** untuk Poltekip;
- 7) **Khusus pelamar formasi pegawai Putra / Putri Papua / Papua Barat melampirkan surat keterangan asli dari Kelurahan / Kepala Desa / Kepala Suku / Ketua / Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua / Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (Bapak dan/atau Ibu) asli dari Papua;**
- 8) Surat Persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon II atau Kepala Kantor Wilayah);
- 9) Surat Pernyataan Persetujuan dari Orang Tua peserta (asli). Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://catar.kemenkumham.go.id>;
- 10) Surat Keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat **yang ditandatangani secara digital oleh Sekretaris Unit Utama / Kepala Biro / Kepala Kantor Wilayah melalui SUMAKER;**
- 11) SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, PPKP tahun 2021 dan 2022 yang **diunggah atau diupdate** pada aplikasi **SIMPEG** masing-masing;
- 12) Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai (PPKP) Tahun 2021 dan Tahun 2022. Khusus PPKP tahun 2021 dibuat menjadi 2 (dua) periode, yaitu Periode I melalui aplikasi SIMPEG dan Periode II dibuat secara manual sesuai dengan ketentuan Permenpan-RB Nomor 8 Tahun 2021 dan untuk PPKP tahun 2022 dibuat 1 (satu) periode secara manual sesuai dengan ketentuan Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2022. Format PPKP Tahun 2021 Periode II dan Tahun 2022 dapat diunduh pada <https://catar.kemenkumham.go.id>);
- 13) Seluruh dokumen persyaratan yang diunggah adalah **scan berkas asli berwarna (tidak hitam putih)** dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka / file tidak rusak dan terbaca dengan jelas;

## V. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan dengan menggunakan **sistem gugur**, masing-masing:

1. Tahapan Seleksi Administrasi (Verifikasi Berkas Unggah).
2. Tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
3. Tahapan Seleksi Lanjutan, meliputi:
  - a. Seleksi Psikotes.
  - b. Seleksi Kesehatan.
  - c. Seleksi Kesamaptaaan.
  - d. Seleksi Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK).

## VI. LAIN-LAIN

1. Poltekim merupakan pendidikan sekolah kedinasan Diploma IV di bidang teknis Keimigrasian dengan program kuliah selama 4 (empat) tahun;
2. Poltekip merupakan pendidikan sekolah kedinasan Diploma IV di bidang teknis Pemasarakatan dengan program kuliah selama 4 (empat) tahun;
3. **Seluruh peserta pada tahapan Seleksi Kompetensi Dasar, kelulusannya didasarkan pada nilai ambang batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 137 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Penerimaan Mahasiswa / Praja / Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2023;**
4. **Bagi pelamar/peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;**
5. **Kesalahan dan/atau lalai dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;**
6. **Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;**
7. Bagi pelamar/peserta seleksi sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir (kelulusan akhir) kemudian mengundurkan diri dan/atau tidak melapor akan diberikan sanksi administratif yakni tidak dapat mendaftar pada tahun berikutnya;
8. **Peserta dalam mengikuti seleksi tidak dipungut biaya;**
9. **Apabila di kemudian hari diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka Ketua Panitia Seleksi berhak menggugurkan kelulusan calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan;**
10. **Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;**
11. Pelayanan informasi dan pengaduan terkait Pelaksanaan Seleksi Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Poltekim dan Poltekip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 dapat melalui saluran sebagai berikut:
  - a. Aplikasi **SIAP (Sistem Informasi dan Pengaduan) Kumham** yang dapat diunduh melalui *google playstore* bagi pengguna *android*. Melalui aplikasi ini peserta dapat mengajukan pertanyaan seputar Tahapan Seleksi dan Jawabannya akan diterima melalui *gadget/smartphone* peserta. Peserta juga dapat melaporkan pengaduan terkait adanya kecurangan langsung kepada Ketua Panitia Seleksi disertai dengan bukti pendukung;
  - b. Akun media sosial sebagai sarana penyampaian informasi seputar Tahapan Seleksi, melalui akun Twitter: **@catarkumham** dan akun Instagram: **@catar.kumham**.
12. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Pengumuman ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di Jakarta

Tanggal 28 Maret 2023

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Sekretaris Jenderal.



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

**JADWAL SELEKSI CALON TARUNA/TARUNI  
SEKOLAH KEDINASAN POLTEKIM DAN POLTEKIP  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Penerimaan ( <i>dikdin.bkn.go.id dan catar.kemenkumham.go.id</i> )	29 Maret 2023
2.	Pendaftaran <i>Online</i> dan Unggah Dokumen	1 – 30 April 2023
3.	Seleksi Kompetensi Dasar (CAT)	Mei – Juni 2023
4.	Pelaksanaan Seleksi Lanjutan a. Seleksi Psikotes. b. Seleksi Kesehatan. c. Seleksi Kesamaptaan. d. Seleksi Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK).	Juli – Oktober 2023

Catatan : Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diinformasikan melalui laman *catar.kemenkumham.go.id*, akun Twitter: **@catarkumham** dan akun Instagram: **@catar.kumham**.

Dikeluarkan di Jakarta  
Tanggal **28** Maret 2023

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Sekretaris Jenderal,



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

